

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Obyek Penelitian

a. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Menunjukkan dan membuktikan pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan implementasi prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa merupakan tujuan dari penelitian ini. Berangkat dari teori yang sudah diuraikan, peneliti akan menganalisis data yang terhimpun berdasarkan rumusan masalah dan perumusan hipotesis yang sudah diidentifikasi guna menentukan diterima atau ditolaknyanya hipotesis.

Kecamatan Batealit adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dimana berada di sebelah timur Kabupaten Jepara yang sebagian besar adalah pemukiman penduduk, perindustrian, dan pertanian yang dapat dijangkau dari kota Kabupaten sekitar 12 Km. Secara geografis Kecamatan Batealit berbatasan dengan kecamatan lain yaitu, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pakis Aji, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pecangaan, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mayong, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tahunan.¹

Sedangkan topografi permukaan daratan dengan ketinggian antara 18 sampai dengan 378 meter dari permukaan laut. dengan luas keseluruhan wilayah 8.887,87 Ha, yang dibagi menjadi 6.636,220 Ha lahan kering dan 2.251,645 Ha lahan sawah. Secara administratif Kecamatan Batealit terdiri dari 11 Desa yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Jepara Nomor 435 Tahun 1966 Tahun, Nomor 1251 Tahun 1966, dan Nomor 1986 Tahun

¹ Murdiyono, *Statistik Daerah Kecamatan Batealit 2016* (Jepara: BPS Jepara, 2016).

2000, yaitu Desa Ngasem, Desa Geneng, Desa Mindahan, Desa Mindahan Kidul, Desa Raguklampitan, Desa Somosari, Desa Bringin, Desa Batealit, Desa Pekalongan, Desa Bawu, dan Desa Bantrung.²

b. Deskripsi Gambaran Responden

Obyek penelitian ini didapat dengan kuesioner yang disebarakan secara langsung kepada responden terkait di 11 kantor pemerintahan desa di wilayah kecamatan Batealit. Berdasarkan teknik *purposive sampling* secara subyektif. Perangkat desa menjabat sebagai kepala desa, sekretaris desa dan kaur keuangan serta staff keuangan merupakan sampel yang dipakai, dimana memiliki pengetahuan dan pengalaman bekerja di bidang keuangan pemerintah desa dengan masa kerja minimal 1 tahun. Peneliti membagikan kuesioner kepada 39 Perangkat Desa yang bekerja di sebelas Balai Desa dalam satu kecamatan. Karakteristik dan klasifikasi yang dimiliki oleh responden penelitian ini, sebagai berikut:

1) Jenis Kelamin Responden

Data responden terpilah menurut jenis kelamin menurut kuesioner yang dikeluarkan ditunjukkan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-laki	31	79,5%
Perempuan	8	20,5%
Total	39	100%

Menurut tabel 4.1, dapat diketahui responden berdasarkan jenis kelamin terbagi menjadi

² Bambang Sarwanto, *Kecamatan Batealit Dalam Angka 2021* (Jepara: BPS Jepara, 2021).

perempuan 8 responden atau 20,5% dan laki-laki 21 responden atau 79,5%. Jadi responden terbanyak adalah laki-laki.

2) Umur Responden

Karakteristik responden selanjutnya yaitu umur responden. Responden yang dipandang memenuhi Kriteria Responden berumur < 30 tahun, 30 s/d 40 tahun, dan > 40 tahun. umur pada tabel 4.2 berikut dijelaskan:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Presentase
< 30 Tahun	1	2,6%
30 s/d 40 Tahun	17	43,6%
> 40 Tahun	21	53,8%
Total	39	100%

Menurut tabel 4.2, dapat diambil kesimpulan responden berdasarkan Umur terbagi menjadi 3 kelompok umur, yaitu < 30 tahun berjumlah 1 responden atau 2,6%, 30 s/d 40 tahun berjumlah 17 responden atau 43,6%, dan > 40 tahun berjumlah 1 responden atau 53,8%. Dari data tersebut responden terbanyak berusia > 40 tahun.

3) Pendidikan Terakhir Responden

Karakteristik jenjang pendidikan terakhir yang dipakai dalam penelitian ini selanjutnya adalah SMA, Diploma (D3) dan Sarjana (S1). Data responden menurut tingkat pendidikan terakhir ditunjukkan pada Tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase
---------------------	-----------	------------

SMA	22	56,4%
D3	3	7,7%
S1	14	35,9%
Total	39	100%

Menurut tabel 4.3, menunjukkan responden berdasarkan pendidikan terakhir diketahui bahwa 22 atau 56,4% responden memiliki pendidikan terakhir SMA, kemudian 3 atau 7,7% responden memiliki pendidikan terakhir D3, dan 14 atau 35,9% responden memiliki pendidikan terakhir S1. Dari data diatas dapat diketahui bahwa responden terbanyak berpendidikan SMA sederajat.

4) Jabatan Responden

Klasifikasi Jabatan responden merupakan karakteristik terpenting yang dimana dapat diketahui, bahwa responden mempunyai pengetahuan dan pengalaman bekerja di bidang keuangan pemerintah desa dan hasil yang diperoleh responden dengan karakteristik pekerjaan yang berbeda dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Frekuensi	Presentase
Kepala Desa	11	28,2%
Sekretaris Desa	11	28,2%
Kaur Keuangan	11	28,2%
Staff Keuangan	6	15,4%
Total	39	100%

Menurut tabel 4.4, menunjukkan responden berdasarkan Jabatan yaitu, Perangkat Desa sebagai Kepala Desa berjumlah 11 atau 28,2%, kemudian Perangkat Desa sebagai Sekretaris Desa berjumlah 11 atau 28,2%, selanjutnya Perangkat Desa

sebagai Kaur Keuangan berjumlah 11 atau 28,2%, dan Perangkat Desa sebagai Staff Keuangan berjumlah 6 atau 15,4%.

5) Masa Kerja Responden

Karakteristik ciri terakhir dari penelitian ini adalah pengalaman berdasarkan jabatan yang diperoleh, karena jabatan tersebut memiliki fungsi dan kewenangan mengelola dana desa. Tergantung pada jabatan masing-masing pegawai, standar masa kerja yang dianggap sebagai responden adalah <3 tahun, 3 s/d 6 tahun, 6 s/d 10 tahun, dan >10 tahun, dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Frekuensi	Presentase
< 3 Tahun	5	12,8%
3 s/d 6 Tahun	11	28,2%
6 s/d 10 tahun	5	12,8%
>10 Tahun	18	46,2%
Total	39	100%

Menurut tabel 4.4, menunjukkan responden berdasarkan masa kerja bahwa, 12,8% menerima jabatan sesuai SK pengangkatan selama <3 tahun, 28,2% menerima jabatan sesuai SK pengangkatan selama 3 s/d 6 tahun, 12,8% menerima jabatan sesuai SK pengangkatan selama 6 s/d 10 tahun, dan 43,6% menerima jabatan sesuai SK pengangkatan selama >10 tahun. Resposnden terbanyak memiliki pengalaman bekerja > 10 tahun di pemerintahan desa.

c. Deskripsi Instrumen

Menurut hasil rekapitulasi jawaban responden perangkat desa yang memiliki pengetahuan dan pengalaman bekerja di bidang keuangan pemerintah desa dengan uraian dibawah ini:

1) Pencegahan *Fraud* (Y)

Tabel 4.6

Frekuensi Variabel Pencegahan *Fraud*

Pertanyaan	Total STS	%	Total TS	%	Total S	%	Total SS	%
Y.1	0	0%	0	0%	17	44%	22	56%
Y.2	0	0%	0	0%	12	31%	27	69%
Y.3	0	0%	0	0%	25	64%	14	36%
Y.4	0	0%	0	0%	22	56%	17	44%
Y.5	0	0%	0	0%	22	56%	17	44%
Y.6	0	0%	2	5%	26	67%	11	28%
Y.7	0	0%	0	0%	31	79%	8	21%
Y.8	0	0%	0	0%	30	77%	9	23%
Y.9	0	0%	0	0%	28	72%	11	28%

- a. Item Y.1, 22 responden menjawab sangat setuju atau (56%), 17 responden menjawab setuju atau (44%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab sangat setuju.
- b. Item Y.2, 27 responden menjawab sangat setuju atau (69%), 12 responden menjawab setuju atau (31%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab sangat setuju.
- c. Item Y.3, 14 responden menjawab sangat setuju atau (36%), 25 responden menjawab setuju atau (64%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- d. Item Y.4, 17 responden menjawab sangat setuju atau (44%), 22 responden menjawab setuju atau (56%), 0 responden menjawab tidak setuju atau

- (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- e. Item Y.5, 17 responden menjawab sangat setuju atau (44%), 22 responden menjawab setuju atau (56%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
 - f. Item Y.6, 11 responden menjawab sangat setuju atau (28%), 26 responden menjawab setuju atau (67%), 2 responden menjawab tidak setuju atau (5%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
 - g. Item Y.7, 8 responden menjawab sangat setuju atau (21%), 31 responden menjawab setuju atau (79%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
 - h. Item Y.8, 9 responden menjawab sangat setuju atau (23%), 30 responden menjawab setuju 30 orang (77%), menjawab tidak setuju sebanyak 0 orang (0%), dan menjawab sangat tidak setuju 0 orang (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
 - i. Item Y.9, 11 responden menjawab sangat setuju atau (28%), 28 responden menjawab setuju atau (72%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.

2) Kompetensi (X_1)

Tabel 4.7
Frekuensi Variabel Kompetensi

Pertanyaan	Total STS	%	Total TS	%	Total S	%	Total SS	%

X1.1	0	0%	0	0%	29	74%	10	26%
X1.2	0	0%	0	0%	32	82%	7	18%
X1.3	0	0%	0	0%	31	79%	8	21%
X1.4	0	0%	0	0%	31	79%	8	21%
X1.5	0	0%	0	0%	25	64%	14	36%
X1.6	0	0%	2	5%	29	74%	8	21%
X1.7	0	0%	0	0%	31	79%	8	21%
X1.8	0	0%	2	5%	29	74%	8	21%
X1.9	0	0%	0	0%	24	62%	15	38%

- a. Item X1.1, 10 responden menjawab sangat setuju atau (26%), 29 responden menjawab setuju atau (74%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- b. Item X1.2, 7 responden menjawab sangat setuju atau (18%), 32 responden menjawab setuju atau (82%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- c. Item X1.3, 8 responden menjawab sangat setuju atau (21%), 31 responden menjawab setuju 31 orang (79%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- d. Item X1.4, 8 responden menjawab sangat setuju atau (21%), 31 responden menjawab setuju 31 orang (82%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- e. Item X1.5, 14 responden menjawab sangat setuju atau (36%), 25 responden menjawab setuju atau (64%), 0 responden menjawab tidak

- setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- f. Item X1.6, 8 responden menjawab sangat setuju atau (21%), 29 responden menjawab setuju atau (74%), 2 responden menjawab tidak setuju atau (5%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- g. Item X1.7, 8 responden menjawab sangat setuju atau (21%), 31 responden menjawab setuju atau (79%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- h. Item X1.8, 8 responden menjawab sangat setuju atau (21%), 29 responden menjawab setuju atau (74%), 2 responden menjawab tidak setuju atau (5%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- i. Item X1.9, 15 responden menjawab sangat setuju atau (38%), 24 responden menjawab setuju atau (62%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.

3) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X₂)

Tabel 4.8
Frekuensi Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pertanyaan	Total STS	%	Total TS	%	Total S	%	Total SS	%
X2.1	0	0%	0	0%	24	62%	15	38%
X2.2	0	0%	0	0%	28	72%	11	28%
X2.3	0	0%	1	3%	25	64%	13	33%
X2.4	0	0%	2	5%	31	80%	6	15%

X2.5	0	0%	0	0%	29	74%	10	26%
X2.6	0	0%	0	0%	32	82%	7	18%
X2.7	0	0%	0	0%	33	85%	6	15%
X2.8	0	0%	1	3%	31	79%	7	18%
X2.9	0	0%	0	0%	25	64%	14	36%
X2.10	0	0%	0	0%	29	74%	10	26%

- a. Item X2.1, 15 responden menjawab sangat setuju atau (38%), 24 responden menjawab setuju atau (62%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- b. Item X2.2, 11 responden menjawab sangat setuju atau (28%), 28 responden menjawab setuju atau (72%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- c. Item X2.3, 13 responden menjawab sangat setuju atau (33%), 25 responden menjawab setuju atau (64%), 1 responden menjawab tidak setuju atau (3%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- d. Item X2.4, 6 responden menjawab sangat setuju atau (15%), 31 responden menjawab setuju atau (80%), 2 responden menjawab tidak setuju atau (5%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- e. Item X2.5, 10 responden menjawab sangat setuju atau (26%), 29 responden menjawab setuju atau (74%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.

- f. Item X2.6, 7 responden menjawab sangat setuju atau (18%), 32 responden menjawab setuju atau (82%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- g. Item X2.7, 6 responden menjawab sangat setuju atau (15%), 33 responden menjawab setuju atau (85%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- h. Item X2.8, 7 responden menjawab sangat setuju atau (18%), 31 responden menjawab setuju atau (79%), 1 responden menjawab tidak setuju atau (3%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- i. Item X2.9, 14 responden menjawab sangat setuju atau (36%), 29 responden menjawab setuju atau (74%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- j. Item X2.10, 10 responden menjawab sangat setuju atau (26%), 29 responden menjawab setuju atau (74%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.

4) Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* (X₃)

Tabel 4.9
Frekuensi Variabel Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance*

Pertanyaan	Total STS	%	Total TS	%	Total S	%	Total SS	%
X3.1	0	0%	1	3%	26	67%	12	31%

X3.2	0	0%	0	0%	16	41%	23	59%
X3.3	0	0%	1	3%	25	64%	13	33%
X3.4	0	0%	0	0%	19	49%	20	51%
X3.5	0	0%	0	0%	22	56%	17	44%
X3.6	0	0%	0	0%	23	59%	16	41%
X3.7	0	0%	2	5%	21	54%	16	41%
X3.8	0	0%	0	0%	27	69%	12	31%
X3.9	0	0%	1	3%	26	67%	12	31%

- a. Item X3.1, 12 responden menjawab sangat setuju atau (31%), 26 responden menjawab setuju atau (67%), 1 responden menjawab tidak setuju atau (3%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- b. Item X3.2, 23 responden menjawab sangat setuju atau (59%), 16 responden menjawab setuju atau (41%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab sangat setuju.
- c. Item X3.3, 13 responden menjawab sangat setuju atau (33%), 25 responden menjawab setuju atau (64%), 1 responden menjawab tidak setuju atau (3%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- d. Item X3.4, 20 responden menjawab sangat setuju atau (51%), 19 responden menjawab setuju atau (49%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab sangat setuju.
- e. Item X3.5, 17 responden menjawab sangat setuju atau (44%), 23 responden menjawab setuju atau (56%), 0 responden menjawab tidak

setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.

- f. Item X3.6, 16 responden menjawab sangat setuju atau (41%), 23 responden menjawab setuju atau (59%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- g. Item X3.7, 16 responden menjawab sangat setuju atau (41%), 21 responden menjawab setuju atau (54%), 2 responden menjawab tidak setuju atau (5%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- h. Item X3.8, 12 responden menjawab sangat setuju atau (31%), 27 responden menjawab setuju atau (69%), 0 responden menjawab tidak setuju atau (0%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.
- i. Item X3.9, 12 responden menjawab sangat setuju atau (31%), 26 responden menjawab setuju atau (66%), 1 responden menjawab tidak setuju atau (3%), dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju atau (0%), bisa diketahui sebagian besar responden menjawab setuju.

2. Analisis Data

a. Analisis Statistik Deskriptif

Nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dipakai mengkaji analisis deskriptif yang diperoleh melalui rangkuman jawaban responden terhadap setiap instrumen variabel. Evaluasi analisis statistik deskriptif penelitian memberikan penilaian mengenai tingkat tanggapan perangkat desa dalam kaitannya instrumen variabel penelitian ini. Berikut hasil analisis deskriptif ditunjukkan pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	39	27	36	30,44	2,789
Kompetensi (X ₁)	39	26	36	29,10	2,780
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X ₂)	39	28	40	32,44	3,185
Implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (X ₃)	39	27	36	30,49	3,347
Valid N (<i>listwise</i>)	39				

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0.

Menurut tabel 4.10, menampilkan informasi mengenai nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi untuk setiap variabel, dijelaskan secara rinci di bawah ini:

1) Pencegahan *Fraud* (Y)

Analisis statistik deskriptif variabel pencegahan *fraud* menunjukkan nilai minimal responden 27 dan nilai maksimal 36. Sedangkan *mean* adalah 30,44 dan standar deviasi adalah 2,789.

2) Kompetensi (X₁)

Analisis statistik deskriptif variabel kompetensi menunjukkan nilai minimal responden 26 dan nilai maksimal 36. Sedangkan *mean*nya adalah 29,10 dan standar deviasinya adalah 2,780.

3) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X₂)

Analisis statistik deskriptif variabel sistem pengendalian internal pemerintah menunjukkan nilai minimal responden 28 dan maksimal 40.

Sedangkan meannya adalah 32,44 dan standar deviasi adalah 3,185.

4) Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* (X_3)

Analisis statistik deskriptif variabel implementasi prinsip *good corporate governance* menunjukkan bahwa responden nilai minimal 27 dan nilai maksimal 36. Sedangkan meannya adalah 30,49 dan standar deviasi adalah 3,347.

b. Uji Validitas

Uji validitas dipakai guna memahami alat ukur yang sudah dikembangkan bisa dipakai dalam mengukur apa yang seharusnya diukur dengan benar pada suatu uji hipotesis. Uji ini memiliki fungsi memverifikasi validitas instrumen kuesioner, dikatakan valid jika instrumen pernyataan menerangkan apa yang coba diukur oleh kuesioner. Dalam mengukur validitas bisa dilaksanakan melalui perbandingan nilai r_{hitung} dan r_{tabel} . Dalam menetapkan r_{tabel} dicari dengan *degree of freedom* (df) 39-2 dengan nilai alpha 5%. Dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dalam penelitian ini terhadap 39 responden didapat nilai r_{tabel} 0,2673. Dari analisis yang sudah dijalankan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pencegahan *Fraud* (Y)

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Variabel Pencegahan *Fraud*

Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Y.1	0,515	0,2673	valid
Y.2	0,469	0,2673	valid
Y.3	0,794	0,2673	valid
Y.4	0,800	0,2673	valid
Y.5	0,556	0,2673	valid
Y.6	0,705	0,2673	valid

Y.7	0,704	0,2673	valid
Y.8	0,687	0,2673	valid
Y.9	0,625	0,2673	valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0.

Menurut tabel 4.11, dapat diambil kesimpulan instrumen pada semua indikator pencegahan *fraud* memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Uji validitas variabel pencegahan *fraud* dikatakan semua “**Valid**”.

2) Kompetensi (X₁)

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi

Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X1.1	0,684	0,2673	valid
X1.2	0,713	0,2673	valid
X1.3	0,675	0,2673	valid
X1.4	0,698	0,2673	valid
X1.5	0,654	0,2673	valid
X1.6	0,744	0,2673	valid
X1.7	0,768	0,2673	valid
X1.8	0,492	0,2673	valid
X1.9	0,816	0,2673	valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0.

Menurut tabel 4.12, dapat diambil kesimpulan instrumen pada semua indikator kompetensi memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Uji validitas variabel kompetensi dikatakan semua “**Valid**”.

3) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X₂)

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X2.1	0,611	0,2673	valid
X2.2	0,692	0,2673	valid
X2.3	0,726	0,2673	valid
X2.4	0,744	0,2673	valid
X2.5	0,759	0,2673	valid
X2.6	0,828	0,2673	valid
X2.7	0,732	0,2673	valid
X2.8	0,620	0,2673	valid
X2.9	0,661	0,2673	valid
X2.10	0,778	0,2673	valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0.

Menurut tabel 4.13, dapat diambil kesimpulan instrumen pada semua indikator sistem pengendalian internal pemerintah memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Uji validitas variabel sistem pengendalian internal pemerintah dikatakan semua “Valid”.

4) Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* (X₃)

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas Variabel Implementasi
Prinsip *Good Corporate Governance*

Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X3.1	0,672	0,2673	valid
X3.2	0,723	0,2673	valid
X3.3	0,682	0,2673	valid
X3.4	0,796	0,2673	valid
X3.5	0,762	0,2673	valid
X3.6	0,776	0,2673	valid
X3.7	0,769	0,2673	valid

X3.8	0,642	0,2673	valid
X3.9	0,719	0,2673	valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0.

Menurut tabel 4.14, dapat diambil kesimpulan instrumen pada semua indikator implementasi prinsip *good corporate governance* memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Uji validitas variabel implementasi prinsip *good corporate governance* dikatakan semua “Valid”.

c. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas penelitian dipakai guna mengukur persepsi responden terhadap instrumen pernyataan angket melalui konsistensi tanggapan. Nilai *Cronbach's alpha* dipakai dalam pengujian ini. Kuesioner dinyatakan reliabel jika nilai alpha yang dinyatakan adalah 0,7 atau lebih tinggi. Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Reliability Coefficien	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Pencegahan Fraud (Y)	9 Item	0,828	0,7	Reliabel
Kompetensi (X ₁)	9 Item	0,862	0,7	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X ₂)	10 Item	0,890	0,7	Reliabel
Implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (X ₃)	9 Item	0,888	0,7	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0.

Menurut tabel 4.15, menunjukkan semua item pertanyaan mengenai pencegahan fraud (Y), kompetensi (X1), sistem pengendalian internal pemerintah (X2), dan implementasi prinsip *good corporate governance* (X3), mempunyai nilai *Cronbach's alpha* > 0,7. Maka dapat ditarik kesimpulan instrumen pada semua indikator pertanyaan tentang variabel penelitian dapat diandalkan dan bisa digunakan sebagai alat penelitian.

d. Uji Prasyarat

Uji asumsi klasik berfungsi sebagai uji syarat dalam analisis regresi linier berganda dan dipakai guna mengetahui ada atau tidaknya normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastis. Uji asumsi klasik menjadi sangat penting sebab merupakan syarat wajib dalam model regresi supaya menjadi valid sebagai alat penduga. Berikut uji asumsi klasik, meliputi:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi ini dipakai dalam menguji nilai residual yang diperoleh dari model regresinya terdistribusi normal atau tidak antara variabel dependen dengan independen. Pengujian normalitas yang dipakai dalam penelitian ini yakni uji *One Sampel Kolomogorov Smirnov*. Distribusi data normal, jika nilai signifikansi > 0,05. Adapun hasil data uji normalitas penelitian ini pada tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		39
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.35907954
Most Extreme Differences	Absolute	.131
	Positive	.131

	Negative	-0.096
Test Statistic		.131
Asymp. Sig. (2-tailed)		.091 ^c

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0.

Menurut tabel 4.16, didapat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,091 yang lebih besar dari signifikansinya 0,05 ($0,091 > 0,05$). Ditarik kesimpulan nilai residual terdistribusi dengan normal.

2) Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik sepatutnya tidak memiliki korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Uji multikolinieritas berfungsi dalam memeriksa dan menguji model regresi terdapat atau ditemukannya korelasi antara variabel dependen atau variabel independen. Dalam memahami setiap variabel independen yang dipakai memiliki kolinieritas tinggi atau tidak, dengan melakukan uji multikolinieritas menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, jika nilai *Tolerance* $> 0,1$ dan *VIF* < 10 . Berikut hasil uji multikolinieritas pada tabel:

Tabel 4.17
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>		Asumsi Multikorelasi
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Kompetensi (X_1)	0,408	2,448	Bebas Multikolinieritas
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X_2)	0,216	4,635	Bebas Multikolinieritas

Implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (X_3)	0,340	2,943	Bebas Multikolinieritas
---	-------	-------	-------------------------

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0.

Menurut tabel 4.17, menunjukkan nilai *tolerance* variabel (X_1) 0,408, variabel (X_2) 0,216, dan variabel (X_3) 0,340 dimana setiap variabel independen mempunyai nilai *tolerance* > 0,1. Sementara, nilai VIF variabel (X_1) 2,448, variabel (X_2) 4,635, dan variabel (X_3) 2,943. Masing-masing variabel independen mempunyai nilai VIF < 10, jadi dikatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

3) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dipakai memahami apakah terjadi korelasi antara *confounding error* pada periode t dan *error* pada periode t-1 (sebelumnya) dalam model regresi linier. Ketika terdapat korelasi, bisa disebut sebagai masalah autokorelasi. Metode pengujian dalam penelitian memakai uji Durbin-Watson (DW test). Hasil pengujian autokorelasi bisa dilihat pada tabel 4.18 berikut:

Tabel 4.18
Hasil Uji Autokorelasi

Tabel DW	Himpunan Penyelesaian	Keterangan
DL	1,3283	
DU	1,6575	
DW	2,2855	DL < DU < DW < 4 - DU
4-DU	2,3425	tidak ada autokorelasi

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0.

Menurut tabel 4.18, diperoleh nilai DU dan DL dari tabel Durbin Watson, dengan memiliki $\alpha = 5\%$, $n = 39$, dan $k = 3$ dan dapat diketahui nilai

DW 2,2855 > nilai DU 1,6575 dan nilai DW < nilai 4-DU 2,3425. Dapat diartikan nilai DW berada ditengah DU dan 4-DU ($1,6575 < 2,2855 < 2,3425$), jadi bisa dikatakan tidak ada autokorelasi di model regresi.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas berfungsi mengetahui apakah model regresi mengalami ketidaksamaan *variance* dari residual pada semua pengamatan. Model pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini memakai koefisien korelasi *Spearman's rho* dalam mendeteksi gejala heteroskedastisitas. Berikut hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.19
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig	Standar Heterokedastisitas	Keterangan
Kompetensi (X ₁)	0,512	0,05	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X ₂)	0,907	0,05	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (X ₃)	0,928	0,05	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0.

Menurut tabel 4.19, bisa dilihat korelasi antar seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05, lalu bisa dikatakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, selanjutnya model regresi dapat dipakai dalam memprediksi pencegahan *fraud* berdasarkan variabel

kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan implementasi prinsip *good corporate governance*.

e. Uji Statistik

1) Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda berfungsi memahami seberapa besar pengaruh setiap variabel independen (kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan implementasi prinsip *good corporate governance*) terhadap variabel dependennya yaitu pencegahan kecurangan (*fraud*) diberikan data penelitian dalam tabel 4.20:

Tabel 4.20
Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		t	Sig
	B	Std. Error		
(Constant)	3,854	2,568	1,501	0,142
Kompetensi (X ₁)	0,273	0,129	2,107	0,042
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X ₂)	0,338	0,155	2,176	0,036
Implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (X ₃)	0,252	0,118	2,143	0,039

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0.

Pada tabel 4.20, diperoleh model persamaan regresi berganda seperti:

$$Y = 3,854 + 0,273X_1 + 0,338X_2 + 0,252X_3 + e$$

Berasal dari persamaan regresi berganda dapat diketahui semua variabel independen bernilai positif, yang berarti jika variabel independen yang dilibatkan dalam model regresi mempunyai

korelasi searah terhadap variabel dependen. Jadi bila angka variabel independen meningkat, begitu juga pencegahan *fraud* dan sebaliknya.

- Nilai konstanta yang didapat 3,854, artinya jika variabel independen yaitu kompetensi (X_1), sistem pengendalian internal pemerintah (X_2), dan implementasi prinsip *good corporate governance* (X_3) bernilai 0 maka pencegahan *fraud* (Y) meningkat. Jadi apabila ketiga variabel independen mengalami peningkatan, sehingga terjadi juga peningkatan terhadap pencegahan *fraud* yang berarti bersifat konstan atau tidak berubah.
- Koefisien regresi kompetensi 0,273, apabila variabel kompetensi meningkat maka pencegahan *fraud* mendapati peningkatan 27,3% dan sebaliknya, diasumsikan variabel lain bernilai konstan.
- Koefisien regresi sistem pengendalian internal pemerintah 0,338, apabila variabel sistem pengendalian internal pemerintah meningkat maka pencegahan *fraud* mendapati peningkatan 33,8% dan sebaliknya, diasumsikan variabel lain bernilai konstan.
- Koefisien Regresi implementasi prinsip *good corporate governance* 0,252, apabila variabel implementasi prinsip *good corporate governance* meningkat maka pencegahan *fraud* mendapati peningkatan sebesar 25,2% dan sebaliknya, diasumsikan variabel lain bernilai konstan.

a) Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi berfungsi memahami besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan produktif dalam memahami besarnya kemampuan model dalam memprediksi variabel independen. Semakin dekat nilai koefisiennya dengan 1,

dapat dikatakan semakin besar variabel independen dapat menguraikan variabel dependen, juga sebaliknya. Bisa dilihat hasil uji koefisien determinasi di bawah ini:

Tabel 4.21
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,873 ^a	0,763	0,742	1,416

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0.

Menurut tabel 4.21, ditemukan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) atau (R^2) diperoleh 0,742. Jadi dikatakan variabel independen kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan implementasi prinsip *good corporate governance* secara bersama-sama saling mempengaruhi variabel dependen yakni pencegahan *fraud* 74,2%, dan sisanya 25,8% pencegahan *fraud* dapat dipengaruhi variabel atau faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

b) Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji F dipakai guna menguji signifikansi pengaruh variabel independen (X_1 , X_2 , dan X_3) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y) dengan menilai kelayakan model regresi yang sudah terbentuk. Dalam uji hipotesis simultan dapat dilaksanakan lewat perbandingan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Untuk menentukan F_{tabel} dicari melalui $F(3; 39-2)$ dengan tingkat signifikansi 5%, maka didapatkan $F(3; 37)$ dengan nilai F_{tabel} 2,86. Bisa dilihat hasil uji hipotesis simultan pada tabel 4.22 dibawah ini:

Tabel 4.22
Hasil Hipotesis Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	225,400	3	75,133	37,465	0,000 ^b
Residual	70,190	35	2,005		
Total	295,590	38			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0.

Menurut tabel 4.22, bisa dilihat tingkat signifikansi yang diperoleh $0,000 <$ tingkat signifikansi $0,05$, Jadi dikatakan variabel kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan implementasi prinsip *good corporate governance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya yaitu pencegahan *fraud*. dengan didukung dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($37,465 > 2,87$).

c) Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji t dipakai guna memahami setiap variabel independen (X) mempengaruhi terhadap variabel dependen (Y) secara individual. Uji Hipotesis parsial ini bandingkan hasil pengujian dengan tingkat signifikansi. Perumusan hipotesis yang telah dikemukakan dapat didukung secara signifikan apabila nilai signifikansi variabel independen $< 0,5$, dan sebaliknya. Serta didukung perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Dalam menentukan nilai t_{tabel} dicari melalui t ($0,5/2 ; 39-3-1$), maka didapatkan t ($0,025 ; 35$) dengan nilai t_{tabel} 2,03011. Hasil uji hipotesis parsial pada tabel 4.23 sebagai berikut:

Tabel 4.23
Hasil Hipotesis Parsial (Uji t)

Variabel	t Hitung	t Tabel	Sig.	Standar Sig.	Kesimpulan
----------	----------	---------	------	--------------	------------

Kompetensi (X ₁)	2,107	2,030	0,042	0,05	Didukung
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X ₂)	2,176	2,030	0,036	0,05	Didukung
Implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (X ₃)	2,143	2,030	0,039	0,05	Didukung

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0.

Menurut tabel 4.23, hasil pengujian pengaruh kompetensi (X₁), sistem pengendalian internal pemerintah (X₂), dan implementasi prinsip *good corporate governance* (X₃) terhadap pencegahan *fraud* (Y) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kompetensi memiliki uji t dengan t_{hitung} 2,107, nilai signifikansi 0,042. Bisa dikatakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,107 > 2,030$) memiliki nilai signifikan ($0,042 < 0,05$). Oleh karena itu ditarik kesimpulan kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Jadi, rumusan hipotesis pertama (H₁) kompetensi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dapat didukung.
2. Sistem pengendalian internal pemerintah memiliki uji t dengan t_{hitung} 2,176, nilai signifikansi 0,036. Bisa dikatakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,176 > 2,030$) memiliki nilai signifikan ($0,036 < 0,05$). Oleh karena itu ditarik kesimpulan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Jadi, rumusan

hipotesis kedua (H_2) sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dapat didukung.

3. Implementasi prinsip *good corporate governance* memiliki uji t dengan t_{hitung} 2,143, nilai signifikansi h 0,039. Bisa dikatakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,143 > 2,030$) memiliki nilai signifikan ($0,039 < 0,05$). Oleh karena itu ditarik kesimpulan implementasi prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Jadi, rumusan hipotesis ketiga (H_3) implementasi prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dapat didukung.

f. Uji Hipotesis

1) Uji Hipotesis 1.

Berdasarkan pada tabel 4.23 sebelumnya, ditunjukkan t_{hitung} 2,107 dan nilai signifikansi 0,042. Menunjukkan nilai t_{hitung} ($2,107$) $>$ t_{tabel} ($2,030$) dan nilai signifikansi ($0,042 < 0,05$). Hal tersebut menunjang hipotesis pertama yang sangat didukung bahwasanya “**kompetensi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa**”.

2) Uji Hipotesis 2

Berdasarkan pada tabel 4.23 sebelumnya, ditunjukkan t_{hitung} 2,176, dan nilai signifikansi 0,036. Menunjukkan nilai t_{hitung} ($2,176$) $>$ t_{tabel} ($2,030$) dan nilai signifikansi ($0,036 < 0,05$). Hal tersebut menunjang hipotesis kedua yang sangat didukung bahwasanya “**sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa**”.

3) Uji Hipotesis 3

Berdasarkan pada tabel 4.23 sebelumnya, ditunjukkan t_{hitung} 2,143, dan nilai signifikansi

0,039. Menunjukkan nilai $t_{hitung} (2,143) > t_{tabel} (2,030)$ dan nilai signifikansi $(0,039 < 0,05)$. Hal tersebut menunjang hipotesis ketiga yang sangat diterima bahwasanya “**implementasi prinsip good corporate governance berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa**”.

4) Uji Hipotesis 4

Berdasarkan pada tabel 4.22 sebelumnya, ditunjukkan $F_{hitung} 37,465$ dan nilai signifikansi 0,000. Menunjukkan nilai $F_{hitung} (37,465) > F_{tabel} (2,86)$ dan nilai signifikansi $(0,000 < 0,05)$. Hal tersebut menunjang hipotesis keempat yang sangat didukung bahwasanya “**secara simultan kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan implementasi prinsip good corporate governance berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa**”.

B. Pembahasan dan Analisa

1. Pengaruh Kompetensi Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Menurut hasil perhitungan dan analisis data yang telah dijalankan oleh peneliti, menunjukkan kompetensi mempunyai pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Dalam penelitian didapatkan hubungan antara kompetensi dengan pencegahan *fraud* yaitu semakin baik kompetensi maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa dan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kecamatan Batealit.

Hal tersebut didukung oleh teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Keberadaan teori keagenan menjelaskan bahwa masyarakat sebagai *principal* mengawasi segala sesuatu yang dilakukan *agent*, dan dengan adanya hubungan ini dapat meminimalisir konflik. Perangkat desa yang bisa berhasil dalam menunjang dan mengelola dana desa, tentunya memiliki kompetensi cukup akseptabel, dimana dalam pekerjaannya ia berhak secara aktif memecahkan masalah

dan mengambil keputusan yang dalam pekerjaannya. Kompetensi seseorang bisa dilihat dari tingkat kreativitasnya, inovasi-inovasi, dan ketrampilan dalam pemecahan masalah. Secara umum keterampilan, pengetahuan, kemampuan dan perilaku individu merupakan kompetensi dalam melaksanakan pekerjaannya.³

Kompetensi perangkat desa memegang peranan penting dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Perangkat desa yang mempunyai kompetensi tinggi akan selalu berjuang dalam menjaga integritasnya sebagai pegawai pemerintah yang berkompeten di pemerintahan desa. Orang yang berkompeten tidak akan bertindak gegabah dan sembrono ketika mengambil keputusan yang akan mengurangi integritasnya. Potensi kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalisir atau dikurangi melalui kompetensi yang mumpuni dari masing-masing pemerintah desa, dan dukungan perangkat desa dengan pengetahuan, kompetensi, dan sikap yang dipersyaratkan oleh standar pelaporan keuangan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *fraud triangle* yang menyatakan bahwa pemicu terjadinya *fraud* pada kompetensi adalah adanya tekanan, jadi jika tidak ada tekanan maka perangkat desa yang berkompeten akan melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik yang menyebabkan tidak terjadi potensi *fraud*. Semakin rendah tekanan terhadap kompetensi perangkat desa maka semakin tinggi tingkat kompetensi perangkat desa, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan *fraud*. Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh Aprilia & Yuniasih menyatakan hasil kompetensi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*,

³ Kadek Widiyarta, dkk, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Buleleng)", *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8, no.2 (2017): 9, diakses pada 2 Febuari, 2022, <https://doi.org/10.23887/JIMAT.V8I2.13930>.

ditunjukkan hasil penelitian didukung teori dan juga membuktikan fenomena yang terjadi, sehingga menarik kesimpulan semakin baik kompetensi maka dapat memaksimalkan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.⁴

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Menurut hasil perhitungan dan analisis data yang telah dijalankan oleh peneliti, menunjukkan sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Dalam penelitian didapatkan hubungan antara sistem pengendalian internal pemerintah dengan pencegahan *fraud* yaitu semakin tinggi baik sistem pengendalian internal pemerintah maka dapat meningkatkan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kecamatan Batealit.

Penanganan asimetri informasi di pemerintah desa dapat dicegah dan dikurangi melalui perbaikan sistem pengendalian internal pemerintah, yang dijelaskan oleh teori keagenan, yang mana meminimalkan munculnya tindakan *fraud*. Apabila sistem pengendalian internal pemerintah dilaksanakan dengan baik, dimulai dengan mewujudkan lingkungan pengendalian yang menunjang, penilaian resiko secara lengkap/menyeluruh, pengendalian serta pemantauan atas pengelolaan dana desa, dengan secara berkesinambungan mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasi.

Pengendalian internal sebagai bentuk dari manajemen risiko, wajib dijalankan setiap organisasi dalam mencapai tujuan organisasi, Kemudian pemerintah desa harus membentuk sistem pengendalian internal

⁴ Kadek Wiwin Indah Aprilia dan Ni Wayan Yuniasih, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangandesa", *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2, no.2 (2021): 42, diakses pada 22 Januari, 2022, <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1521>.

pemerintah, dimana wajib dijalankan secara konsisten dalam menjamin kontinuitas dan kepercayaan dari masyarakat. Hasil analisis membuktikan bahwa 11 pemerintah desa di Kecamatan Batealit telah mempraktikkan sistem pengendalian internal pemerintah dengan sesuai atau tepat dan memenuhi tujuan agar dapat mencegah *fraud* pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *fraud triangle* yang mengungkapkan pemicu terjadinya *fraud* pada sistem pengendalian internal pemerintah adalah adanya kesempatan, dikarenakan dengan adanya kesempatan, akan menimbulkan tindakan *fraud* dapat terjadi. Dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah dapat membuat pengelolaan dana desa lebih terarah, terawasi, dan terdeteksi. Ditunjukkan dengan sistem pengendalian internal pemerintah sangat berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh Larasati, dkk menyatakan hasil sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, ditunjukkan hasil penelitian didukung teori dan juga membuktikan fenomena yang terjadi. Sehingga menarik kesimpulan semakin baik sistem pengendalian internal maka dapat memaksimalkan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.⁵

3. Pengaruh Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Menurut hasil perhitungan dan analisis data yang telah dijalankan oleh peneliti, menunjukan implementasi prinsip *good corporate governance* mempunyai pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Dalam penelitian didapatkan hubungan antara implementasi prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan

⁵ Yarry Septia Larasati, dkk, "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa", *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 3, no.2 (2017): 58, diakses pada 1 Februari, 2022, <https://doi.org/10.34204/JIAFE.V3I2.759>.

fraud yaitu semakin baik *good corporate governance* maka dapat meningkatkan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kecamatan Batealit.

Teori keagenan seperti yang dijelaskan di deskripsi teori yang telah dipaparkan sebelumnya menyatakan implementasi setiap prinsip *good corporate governance* sebagai cara menjembatani konflik antara masyarakat dan pemerintah desa. Berasal dari konflik yang terjadi, menjelaskan bahwa *agent* (pemerintah desa) lebih banyak tahu tentang informasi di pemerintah desa daripada *principal* (masyarakat).

Agar pemerintah desa dapat memaksimalkan kinerja dalam mencapai tujuannya, dan dapat berkembang dengan baik dengan catatan harus mengimplementasikan prinsip-prinsip dari *good corporate governance*. Pemerintah Desa sebagai *agent* harus melibatkan masyarakat sebagai *principal* di dalam kegiatan/progam untuk kesejahteraan rakyat desa, seperti halnya kepala desa, perangkat desa, dan BPD menyusun APBDesa dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbagdes).

Pemerintah desa memiliki kecenderungan yang kuat munculnya kecurangan (*fraud*), untuk memastikan pengelolaan suatu organisasi dilaksanakan sesuai dengan aturan dan hukum yang ada, dimana pengelolaan suatu organisasi harus dipantau dan dikendalikan. Dengan adanya implementasi prinsip *good corporate governance* oleh pemerintah desa dapat menghambat munculnya *fraud* karena prinsip *good corporate governance*, maka dari itu diperlukan adanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam mengelola dana desa.

Hasil ini sejalan dengan teori *fraud triangle* yang menyatakan bahwa pemicu terjadinya *fraud* pada implementasi prinsip *good corporate governance* adalah adanya rasionalisasi. Jika prinsip *good corporate governance* diterapkan dengan baik maka pelaku menjadi insaf untuk melakukan tindakan *fraud*, sehingga pelaku tidak membenarkan tindakan *fraud* yang dilakukan dan

potensi *fraud* dapat dikurangi atau dicegah. Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh Soleman menyatakan hasil implementasi prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, ditunjukkan hasil penelitian didukung teori dan juga membuktikan fenomena yang terjadi. Sehingga menarik kesimpulan semakin baik implementasi prinsip *good corporate governance* maka dapat memaksimalkan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.⁶

4. Pengaruh Kompetensi, SPIP, dan Implementasi Prinsip GCG Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

Menurut hasil perhitungan dan analisis data yang telah dijalankan oleh peneliti, menunjukkan secara bersama-sama kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan implementasi prinsip *good corporate governance* mempunyai pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Pemerintah desa sebenarnya adalah pemerintah paling melekat dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Bagaimanapun pada pelayanan publik dan pemberdayaan, pemerintah desa mempunyai peran dan posisi yang strategis di masyarakat. Oleh karena itu, dalam memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, sektor apapun wajib memberdayakan masyarakat desa.⁷ Satu unsur pelaku desa yang berperan penting dalam memajukan kehidupan bangsa melalui sektor desa adalah perangkat desa dan dengan segala sumber daya yang dimiliki desa secara baik (*Good Governance*) diminta agar mengelola dan

⁶ Rusman Soleman, "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud", *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 17, no. 1 (2013): 71, diakses pada 2 Februari, 2022, <https://doi.org/10.20885/JAAI.VOL17.ISS1.ART5>.

⁷ Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4, no.1 (2016): 50, diakses pada 14 Mei, 2022, <https://doi.org/10.21070/JKMP.V4I1.198>.

mengembangkan masyarakat bersifat demokratis dan terdesentralisasi.⁸

Besarnya pengaruh dari sistem pengendalian internal pemerintah mengacu pada sistem yang dipraktikkan di area pemerintahan desa memiliki pengaruh paling besar yaitu 0,338 atau 33,8% di dalam mencegah terjadinya *fraud* pengelolaan dana desa. Pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa juga dipengaruhi oleh kompetensi menunjukkan bahwa kompetensi dari seorang perangkat desa mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*) sebesar 0,273 atau 27,3%. Besarnya pengaruh dari implementasi prinsip *good corporate governance* menunjukkan pemerintah desa melalui penerapan prinsip-prinsipnya dimana memiliki pengaruh yang paling kecil yaitu 0,252 atau 25,2% terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Sesuai dengan teori keagenan dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa kompetensi seluruh perangkat desa, sistem pengendalian internal pemerintah yang dipraktikkan, dan terlaksanakannya prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik di pemerintahan desa yang berperan penting dalam pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan pengawasan guna memastikan dana desa dikelola sudah sesuai dengan hukum yang ada. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *fraud triangle* yang menyatakan bahwa pemicu terjadinya *fraud* pada kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan implementasi prinsip *good corporate governance* adalah tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Dari penelitian yang dilakukan Widyawati, dkk tahun 2019 menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* 77,5 % dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, *whistleblowing system*, dan sistem pengendalian internal,

⁸ Neny Tri Indrianasari, "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa", *Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1, no.2 (2017), 33, diakses pada 14 Mei, 2022, <https://doi.org/10.30741/ASSETS.V1I2.28>.

di penerapan *whistleblowing system* menjadi suatu alat ukur yang dapat dipakai dalam mencegah terjadinya korupsi atau *fraud* yang bisa terjadi pada pengelolaan keuangan.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Hanafi tahun 2018 menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh 71,4% dari variabel jenis kelamin, usia, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan moralitas individu.¹⁰

Dari beberapa penelitian yang sudah dikaji, bisa diketahui bahwa kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan implementasi prinsip *good corporate governance* mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pencegahan *fraud* karena dari tiga variabel tersebut mempunyai nilai korelasi 74,2% dan sisa 25,8% dapat dipengaruhi beberapa faktor lain terhadap pencegahan *fraud*, seperti budaya etis organisasi yang mana berimplikasi kepada kewajiban bagi pihak terkait untuk mengupayakan pemupukan moralitas individu bagi perangkat pemerintah desa.

⁹ Ni Putu Agustina Widyawati, dkk, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDES", *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 10, no.3 (2019): 370, diakses pada 2 Februari, 2022, <https://doi.org/10.23887/JIMAT.V10I3.22806>.

¹⁰ Provita Wijayanti dan Rustam Hanafi, "Pencegahan Fraud di Pemerintah Desa", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9, no.2 (2018): 334, diakses pada 2 Februari, 2022, <https://doi.org/10.18202/JAMAL.2018.04.9020>.